



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

## SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG

### KEPALA NASKAH DINAS, KODE UNIT ORGANISASI, KODE UNIT KERJA, DAN CAP DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth.

1. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Semua Kepala Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Semua Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
9. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berdampak pada pengaturan tata naskah dinas, perlu adanya pengaturan atas naskah dinas pada fase transisi sampai dengan ditetapkannya peraturan tentang tata naskah dinas yang baru.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut.

1. Pengaturan kepala surat, kode unit organisasi, kode unit kerja, dan cap dinas dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Kepala Surat dicetak sesuai ketentuan:
    - 1) jarak dari tepi atas kertas ke garis penutup: 4,5 cm;
    - 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditulis dengan huruf kapital dan menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 16;
    - 3) nama unit utama/eselon I selain Sekretariat Jenderal ditulis dengan huruf kapital dan menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 14 serta dicetak lebih tebal dari pada nama Kementerian;

- 4) nama pusat, perguruan tinggi negeri, lembaga layanan pendidikan tinggi, unit pelaksana teknis, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film ditulis dengan huruf kapital dan menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 14 serta dicetak lebih tebal dari pada nama Kementerian;
- 5) alamat ditulis lengkap tanpa singkatan atau akronim (penggalan) dengan menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 12;
- 6) lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0398/M/1977 tanggal 6 September 1977 dengan uraian lambang sebagai berikut:




- a) Bidang Segi Lima (Biru Muda)  
Menggambarkan alam kehidupan Pancasila.
- b) Semboyan Tut Wuri Handayani  
Digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Pencantuman semboyan ini berarti melengkapi penghargaan dan penghormatan kita terhadap almarhum Ki Hajar Dewantara yang hari lahirnya telah dijadikan Hari Pendidikan Nasional.
- c) Belencong Menyala Bermotif Garuda  
Belencong (menyala) merupakan lampu yang khusus dipergunakan pada pertunjukan wayang kulit. Cahaya belencong membuat pertunjukan menjadi hidup.  
Burung Garuda (yang menjadi motif belencong) memberikan gambaran sifat dinamis, gagah perkasa, mampu, dan berani mandiri mengarungi angkasa luas.  
Ekor dan sayap garuda digambarkan masing-masing lima, yang berarti: "Satu kata dengan perbuatan Pancasila".
- d) Buku  
Buku merupakan sumber bagi segala ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- e) Warna  
Warna putih pada ekor dan sayap garuda dan buku berarti suci, bersih tanpa pamrih.  
Warna kuning emas pada nyala api berarti keagungan dan keluhuran pengabdian.

Warna biru muda pada bidang segi lima berarti pengabdian yang tak kunjung putus dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam (pandangan hidup Pancasila).

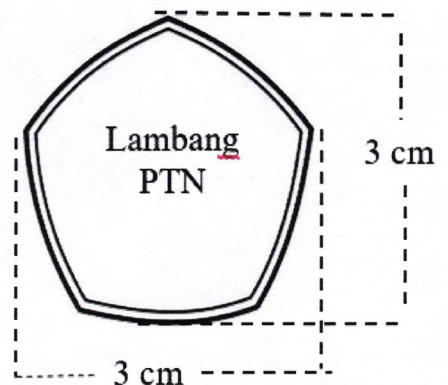
Spesifikasi warna dalam lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Warna	CMYK (cetakan)			
	C (centa)	M (magenta)	Y (yellow)	K (black)
Putih	0%	0%	0%	0%
Kuning Emas	2%	15%	100%	0%
Biru Muda	95%	25%	0%	0%

Sumber: Perhitungan warna dengan software Photoshop CS4 menggunakan mode Color Picker

Warna	Hasil warna
Putih	
Kuning Emas	
Biru Muda	

- 7) kepala naskah dinas perguruan tinggi negeri menggunakan lambang perguruan tinggi negeri yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam statuta yang berada dalam bidang segi lima bergaris ganda dengan garis luar dibuat lebih tebal daripada garis dalam.
- 8) lambang Kementerian maupun lambang perguruan tinggi negeri pada kepala naskah dinas dapat dicetak berwarna sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0398/M/1977 maupun statuta perguruan tinggi negeri terkait atau dicetak hitam putih dengan ukuran:
  - Tinggi : 3 cm
  - Lebar : 3 cm



- 9) kepala naskah dinas ditutup dengan menggunakan garis tebal tunggal.
- b. Kode unit organisasi dan kode unit kerja tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
- c. Cap dinas
- 1) Kerangka cap jabatan Menteri dan cap dinas Kementerian, unit utama, dan pusat terdiri atas:
    - a) garis lingkaran luar berdiameter 45 mm dan garis lingkaran dalam berdiameter 30 mm;
    - b) garis lingkaran luar dibuat dengan garis lingkaran ganda; dan
    - c) garis lingkaran luar bagian luar dibuat lebih tebal daripada garis lingkaran luar bagian dalam.
  - 2) Kerangka cap dinas lembaga layanan pendidikan tinggi, unit pelaksana teknis, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film terdiri atas:
    - a) garis lingkaran luar berdiameter 45 mm dan garis lingkaran dalam berdiameter 30 mm;
    - b) garis lingkaran luar dibuat dengan garis lingkaran tunggal; dan
    - c) garis lingkaran luar dibuat lebih tebal daripada garis lingkaran dalam.
  - 3) Kerangka cap jabatan dan cap dinas perguruan tinggi negeri berbentuk segi lima sama sisi terdiri atas:
    - a) garis lengkung ke luar dengan sudut 72 derajat dalam posisi berdiri dan berdiameter 40 mm;
    - b) garis lengkung luar dibuat dengan garis ganda; dan
    - c) garis lengkung luar dibuat lebih tebal daripada garis lengkung dalam.

Contoh cap jabatan dan cap dinas tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Januari 2020

Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im

NIP 196012041986011001

Tembusan:  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEPALA NASKAH DINAS, KODE UNIT ORGANISASI,  
KODE UNIT KERJA, DAN CAP DINAS DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. Contoh Kepala Naskah Dinas

1. Kepala Peraturan, Keputusan, dan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

2. Kepala Naskah Dinas Wakil Menteri, Sekretariat Jenderal, dan Staf Ahli



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) .....  
Laman .....

- 
3. Kepala Naskah Dinas Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**DIREKTORAT JENDERAL  
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Alamat .....  
Telepon .....  
Laman .....

---

4. Kepala Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,**  
**PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Alamat .....  
Telepon .....  
Laman .....

---

5. Kepala Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Alamat .....  
Telepon .....  
Laman .....

---

6. Kepala Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Alamat .....  
Telepon .....  
Laman .....

---

7. Kepala Naskah Dinas Direktorat Jenderal Kebudayaan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

Alamat .....  
Telepon .....  
Laman .....

---

8. Kepala Naskah Dinas Inspektorat Jenderal



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Alamat.....  
Telepon .....  
Laman .....

---

9. Kepala Naskah Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**DAN PERBUKUAN**

Alamat.....  
Telepon .....  
Laman .....

---

10. Kepala Naskah Dinas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Alamat.....  
Telepon .....  
Laman .....

---

11. Kepala Naskah Dinas Perguruan Tinggi Negeri



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Alamat .....  
Telepon .....  
Laman .....

---

12. Kepala Naskah Dinas Fakultas Perguruan Tinggi Negeri



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Alamat .....  
Telepon .....  
Laman .....

---

13. Kepala Naskah Dinas Politeknik Negeri



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**

Alamat .....  
Telepon .....  
Laman .....

---

14. Kepala Naskah Dinas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**WILAYAH I**

Alamat .....  
Telepon .....  
Laman .....

---

15. Kepala Naskah Dinas Pusat Data dan Teknologi Informasi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Alamat .....  
Telepon .....  
Laman .....

---



16. Kepala Naskah Dinas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Alamat .....  
Telepon .....  
Laman .....

---

17. Kepala Naskah Dinas Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
JAWA TENGAH**

Alamat .....  
Telepon .....  
Laman .....

---

18. Kepala Naskah Dinas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
JAWA BARAT**

Alamat .....  
Telepon .....  
Laman .....

---

19. Kepala Naskah Dinas Balai Bahasa



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**BALAI BAHASA  
SUMATERA UTARA**

Alamat .....  
Telepon .....  
Laman .....

---

20. Kepala Naskah Dinas Balai Pelestarian Cagar Budaya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA  
GORONTALO**

Alamat .....  
Telepon .....  
Laman .....

---

21. Kepala Naskah Dinas Balai Arkeologi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**BALAI ARKEOLOGI  
PAPUA**

Alamat .....  
Telepon .....  
Laman .....

---

B. Kode Jabatan, Unit Organisasi, dan Unit Kerja

1. Kode Jabatan

- |  |          |
|--|----------|
| a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan                   | kode MPK |
| b. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan | kode SA  |

2. Kode Unit Organisasi

a. Unit Utama dan Pusat

- |   |        |
|---|--------|
| 1) Sekretariat Jenderal   | kode A |
| 2) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan   | kode B |
| 3) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | kode C |
| 4) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  | kode D |
| 5) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  | kode E |
| 6) Direktorat Jenderal Kebudayaan   | kode F |
| 7) Inspektorat Jenderal   | kode G |
| 8) Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan  | kode H |
| 9) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  | kode I |
| 10) Pusat-Pusat   | kode J |

b. Perguruan Tinggi Negeri

- |                   |         |
|-------------------|---------|
| 1) Universitas    | kode UN |
| 2) Institut       | kode IT |
| 3) Sekolah Tinggi | kode ST |
| 4) Politeknik     | kode PL |

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| c. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | kode LL |
|--------------------------------------|---------|

3. Kode Unit Kerja

a. Sekretariat Jenderal

- |  |         |
|--|---------|
| 1) Biro Perencanaan                        | kode A1 |
| 2) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara   | kode A2 |
| 3) Biro Sumber Daya Manusia                | kode A3 |
| 4) Biro Organisasi dan Tata Laksana        | kode A4 |
| 5) Biro Hukum                              | kode A5 |
| 6) Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat | kode A6 |
| 7) Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa | kode A7 |

b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

- |  |         |
|--|---------|
| 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan                      | kode B1 |
| 2) Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan          | kode B2 |
| 8) Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini                 | kode B3 |
| 3) Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar                          | kode B4 |
| 4) Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | kode B5 |

c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

- |   |         |
|---|---------|
| 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | kode C1 |
| 2) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini   | kode C2 |
| 3) Direktorat Sekolah Dasar   | kode C3 |
| 4) Direktorat Sekolah Menengah Pertama  | kode C4 |
| 5) Direktorat Sekolah Menengah Atas   | kode C5 |
| 6) Direktorat Pendidikan Khusus   | kode C6 |

d. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

- |   |         |
|---|---------|
| 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi                    | kode D1 |
| 2) Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan                                 | kode D2 |
| 3) Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi                      | kode D3 |
| 4) Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri | kode D4 |

- e. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
  - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kode E1
  - 2) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan kode E2
  - 3) Direktorat Kelembagaan kode E3
  - 4) Direktorat Sumber Daya kode E4
  
- f. Direktorat Jenderal Kebudayaan
  - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan kode F1
  - 2) Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat kode F2
  - 3) Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru kode F3
  - 4) Direktorat Pelindungan Kebudayaan kode F4
  - 5) Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan kode F5
  - 6) Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan kode F6
  
- g. Inspektorat Jenderal
  - 1) Sekretariat Inspektorat Jenderal kode G1
  - 2) Inspektorat I kode G2
  - 3) Inspektorat II kode G3
  - 4) Inspektorat III kode G4
  - 5) Inspektorat IV kode G5
  - 6) Inspektorat Investigasi kode G6
  
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
  - 1) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan kode H1
  - 2) Pusat Penelitian Kebijakan kode H2
  - 3) Pusat Asesmen dan Pembelajaran kode H3
  - 4) Pusat Kurikulum dan Perbukuan kode H4
  - 5) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional kode H5
  
- i. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
  - 1) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kode I1
  - 2) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra kode I2
  - 3) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra kode I3
  
- j. Pusat-Pusat
  - 1) Pusat Data dan Teknologi Informasi kode J1
  - 2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai kode J2
  - 3) Pusat Prestasi Nasional kode J3
  - 4) Pusat Penguatan Karakter kode J4
  - 5) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan kode J5

- k. Sekretariat Lembaga Sensor Film kode K1
- l. UPT Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
- 1) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika kode B6.1
  - 2) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Seni dan Budaya kode B6.2
  - 3) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri kode B6.3
  - 4) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian kode B6.4
  - 5) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata kode B6.5
  - 6) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik kode B6.6
  - 7) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika kode B6.7
  - 8) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam kode B6.8
  - 9) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa kode B6.9
  - 10) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa kode B6.10
  - 11) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling kode B6.11
  - 12) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKN dan IPS kode B6.12
  - 13) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah kode B6.13
  - 14) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi kode B6.14
- m. UPT Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
- 1) Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Barat kode C7.1
  - 2) Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah kode C7.2

- 3) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Utara kode C7.3
- 4) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Timur kode C7.4
- 5) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Selatan kode C7.5
- 6) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Selatan kode C7.6
- 7) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat kode C7.7
- 8) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Papua kode C7.8
- 9) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Aceh kode C7.9
- 10) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat kode C7.10
- 11) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Riau kode C7.11
- 12) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Bengkulu kode C7.12
- 13) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Selatan kode C7.13
- 14) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Lampung kode C7.14
- 15) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Banten kode C7.15
- 16) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta kode C7.16
- 17) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Bali kode C7.17
- 18) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Timur kode C7.18
- 19) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Barat kode C7.19
- 20) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Timur kode C7.20
- 21) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Barat kode C7.21
- 22) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Utara kode C7.22

- |  |            |
|--|------------|
| 23) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Tengah   | kode C7.23 |
| 24) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Tenggara | kode C7.24 |
| 25) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Maluku            | kode C7.25 |
| 26) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jambi             | kode C7.26 |
| 27) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Tengah | kode C7.27 |
| 28) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Gorontalo         | kode C7.28 |
| 29) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Maluku Utara      | kode C7.29 |
| 30) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh  | kode C7.30 |
| 31) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara  | kode C7.31 |
| 32) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat  | kode C7.32 |
| 33) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Riau  | kode C7.33 |
| 34) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau  | kode C7.34 |
| 35) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jambi   | kode C7.35 |
| 36) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung                             | kode C7.36 |
| 37) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung   | kode C7.37 |
| 38) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu  | kode C7.38 |
| 39) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan                                      | kode C7.39 |
| 40) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Banten  | kode C7.40 |
| 41) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan D.K.I Jakarta   | kode C7.41 |
| 42) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat  | kode C7.42 |
| 43) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah   | kode C7.43 |
| 44) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan D.I. Yogyakarta                                       | kode C7.44 |
| 45) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur  | kode C7.45 |
| 46) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bali  | kode C7.46 |
| 47) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat                                   | kode C7.47 |
| 48) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur                                   | kode C7.48 |
| 49) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat                                      | kode C7.49 |

50) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah	kode C7.50
51) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan	kode C7.51
52) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	kode C7.52
53) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara	kode C7.53
54) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah	kode C7.54
55) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan	kode C7.55
56) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara	kode C7.56
57) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat	kode C7.57
58) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	kode C7.58
59) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku	kode C7.59
60) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku Utara	kode C7.60
61) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua	kode C7.61
62) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat	kode C7.62
63) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara	kode C7.63

n. Perguruan Tinggi Negeri

1) Universitas Gadjah Mada (UGM)	kode UN1
2) Universitas Indonesia (UI)	kode UN2
3) Universitas Airlangga (Unair)	kode UN3
4) Universitas Hasanuddin (Unhas)	kode UN4
5) Universitas Sumatera Utara (USU)	kode UN5
6) Universitas Padjadjaran (Unpad)	kode UN6
7) Universitas Diponegoro (Undip)	kode UN7
8) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam)	kode UN8
9) Universitas Sriwijaya (Unsri)	kode UN9
10) Universitas Brawijaya (UB)	kode UN10
11) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah)	kode UN11
12) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)	kode UN12
13) Universitas Pattimura (Unpati)	kode UN13
14) Universitas Udayana (Unud)	kode UN14
15) Universitas Nusa Cendana (Undana)	kode UN15
16) Universitas Andalas (Unand)	kode UN16
17) Universitas Mulawarman (Unmul)	kode UN17
18) Universitas Mataram (Unram)	kode UN18
19) Universitas Riau (Unri)	kode UN19
20) Universitas Cendrawasih (Uncen)	kode UN20



21) Universitas Jambi (Unja)	kode UN21
22) Universitas Tanjungpura (Untan)	kode UN22
23) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)	kode UN23
24) Universitas Palangkaraya (Unpar)	kode UN24
25) Universitas Jember (Unej)	kode UN25
26) Universitas Lampung (Unila)	kode UN26
27) Universitas Sebelas Maret (UNS)	kode UN27
28) Universitas Tadulako (Untad)	kode UN28
29) Universitas Haluoleo (Unhalu)	kode UN29
30) Universitas Bengkulu (Unib)	kode UN30
31) Universitas Terbuka (UT)	kode UN31
32) Universitas Negeri Malang (UM)	kode UN32
33) Universitas Negeri Medan (Unimed)	kode UN33
34) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)	kode UN34
35) Universitas Negeri Padang (UNP)	kode UN35
36) Universitas Negeri Makassar (UNM)	kode UN36
37) Universitas Negeri Semarang (Unnes)	kode UN37
38) Universitas Negeri Surabaya (Unesa)	kode UN38
39) Universitas Negeri Jakarta (UNJ)	kode UN39
40) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)	kode UN40
41) Universitas Negeri Manado (Unima)	kode UN41
42) Universitas Negeri Papua (Unipa)	kode UN42
43) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)	kode UN43
44) Universitas Khairun (Unkhair)	kode UN44
45) Universitas Malikussaleh (Unimal)	kode UN45
46) Universitas Trunojoyo Madura (Unijoyo)	kode UN46
47) Universitas Negeri Gorontalo (UNG)	kode UN47
48) Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha)	kode UN48
49) Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan)	kode UN49
50) Universitas Bangka Belitung (UBB)	kode UN50
51) Universitas Borneo Tarakan (UBT)	kode UN51
52) Universitas Musamus (Unimus)	kode UN52
53) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)	kode UN53
54) Universitas Samudra (Unsam)	kode UN54
55) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar)	kode UN55
56) Universitas Sembilan Belas November Kolaka (USN Kolaka)	kode UN56
57) Universitas Tidar (Untidar)	kode UN57
58) Universitas Siliwangi (Unsil)	kode UN58
59) Universitas Teuku Umar (UTU)	kode UN59
60) Universitas Timor (Unimor)	kode UN60
61) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta)	kode UN61

- |   |           |
|---|-----------|
| 62) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN Veteran Yogya) | kode UN62 |
| 63) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) | kode UN63 |
| 64) Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika)                            | kode UN64 |
| o. Institut   |           |
| 1) Institut Teknologi Bandung (ITB)   | kode IT1  |
| 2) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)                                | kode IT2  |
| 3) Institut Pertanian Bogor (IPB)   | kode IT3  |
| 4) Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI Yogya)                           | kode IT4  |
| 5) Institut Seni Indonesia Denpasar (ISI Denpasar)                          | kode IT5  |
| 6) Institut Seni Indonesia Surakarta (ISI Surakarta)                        | kode IT6  |
| 7) Institut Seni Indonesia Padang Panjang (ISI Padang Panjang)              | kode IT7  |
| 8) Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (ISBI Bandung)                    | kode IT8  |
| 9) Institut Teknologi Sumatera (Itera)                                      | kode IT9  |
| 10) Institut Teknologi Kalimantan (ITK)                                     | kode IT10 |
| 11) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh (ISBI Aceh)                         | kode IT11 |
| 12) Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua (ISBI Papua)                 | kode IT12 |
| p. Sekolah Tinggi   |           |
| 1) Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)                                   | kode ST1  |
| q. Politeknik   |           |
| 1) Politeknik Negeri Bandung (Polban)                                       | kode PL1  |
| 2) Politeknik Negeri Malang (Polinema)                                      | kode PL2  |
| 3) Politeknik Negeri Jakarta (PNJ)  | kode PL3  |
| 4) Politeknik Negeri Semarang (Polnes)                                      | kode PL4  |
| 5) Politeknik Negeri Medan (Polimed)  | kode PL5  |
| 6) Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri)                                     | kode PL6  |
| 7) Politeknik Negeri Samarinda (Polnes)                                     | kode PL7  |
| 8) Politeknik Negeri Bali (PNB)   | kode PL8  |
| 9) Politeknik Negeri Padang (PNP)   | kode PL9  |
| 10) Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP)                                  | kode PL10 |
| 11) Politeknik Manufaktur Negeri Bandung (Polman Bandung)                   | kode PL11 |
| 12) Politeknik Negeri Manado (Polimdo)                                      | kode PL12 |
| 13) Politeknik Negeri Ambon (Polnam)  | kode PL13 |
| 14) Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)                           | kode PL14 |
| 15) Politeknik Negeri Lampung (Polinela)                                    | kode PL15 |
| 16) Politeknik Negeri Pontianak (Polnep)                                    | kode PL16 |
| 17) Politeknik Negeri Jember (Polije)                                       | kode PL17 |
| 18) Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban)                                 | kode PL18 |
| 19) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS)                            | kode PL19 |
| 20) Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL)                                     | kode PL20 |

21) Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani Samarinda)	kode PL21
22) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan (Politani Pangkep)	kode PL22
23) Politeknik Negeri Kupang (Poltek Kupang)	kode PL23
24) Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Politani Kupang)	kode PL24
25) Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh (Politani Payakumbuh)	kode PL25
26) Politeknik Negeri Tual (Polikant)	kode PL26
27) Politeknik Media Kreatif Negeri Jakarta (Polimedia)	kode PL27
28) Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polman Babel)	kode PL28
29) Politeknik Negeri Batam (Poltek Batam)	kode PL29
30) Politeknik Negeri Nusa Utara (Polnustar)	kode PL30
31) Politeknik Negeri Bengkalis (Poltek Bengkalis)	kode PL31
32) Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba)	kode PL32
33) Politeknik Negeri Madiun (PNM)	kode PL33
34) Politeknik Negeri Madura (Poltera)	kode PL34
35) Politeknik Negeri Fakfak (Polinef)	kode PL35
36) Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi)	kode PL36
37) Politeknik Negeri Sambas (Poltesa)	kode PL37
38) Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin)	kode PL38
39) Politeknik Negeri Ketapang (Politap)	kode PL39
40) Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala)	kode PL40
41) Politeknik Negeri Subang (Poltek Subang)	kode PL41
42) Politeknik Negeri Indramayu (Polindra)	kode PL42
43) Politeknik Negeri Cilacap (Poltek Cilacap)	kode PL43

r. Akademi Komunitas

1) Akademi Komunitas Negeri Pacitan	kode AK1
2) Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	kode AK2
3) Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	kode AK3
4) Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	kode AK4

s. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

1) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I	kode LL1
2) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II	kode LL2
3) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	kode LL3
4) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV	kode LL4
5) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V	kode LL5
6) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI	kode LL6
7) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII	kode LL7
8) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII	kode LL8
9) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX	kode LL9
10) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X	kode LL10
11) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI	kode LL11
12) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII	kode LL12
13) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII	kode LL13

- 14) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV kode LL14
- 15) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV kode LL15

t. UPT Direktorat Jenderal Kebudayaan

- 1) Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan kode F7.1
- 2) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur kode F7.2
- 3) Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I.Yogyakarta kode F7.3
- 4) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah kode F7.4
- 5) Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten kode F7.5
- 6) Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali kode F7.6
- 7) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi kode F7.7
- 8) Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat kode F7.8
- 9) Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh kode F7.9
- 10) Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo kode F7.10
- 11) Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara kode F7.11
- 12) Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur kode F7.12
- 13) Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran kode F7.13
- 14) Balai Konservasi Borobudur kode F7.14
- 15) Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I.Yogyakarta kode F7.15
- 16) Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat kode F7.16
- 17) Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan kode F7.17
- 18) Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali kode F7.18
- 19) Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara kode F7.19
- 20) Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat kode F7.20
- 21) Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat kode F7.21
- 22) Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua kode F7.22
- 23) Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau kode F7.23
- 24) Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku kode F7.24
- 25) Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh kode F7.25
- 26) Museum Nasional kode F7.26
- 27) Museum Kebangkitan Nasional kode F7.27
- 28) Museum Benteng Vrederburg kode F7.28
- 29) Museum Sumpah Pemuda kode F7.29
- 30) Museum Perumusan Naskah Proklamasi kode F7.30
- 31) Museum Basoeki Abdullah kode F7.31
- 32) Galeri Nasional Indonesia kode F7.32
- 33) Museum Kepresidenan Republik Indonesia kode F7.33
- Balai Kirti

u. UPT Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

- 1) Balai Arkeologi D.I.Yogyakarta kode H6.1
- 2) Balai Arkeologi Bali kode H6.2
- 3) Balai Arkeologi Sumatera Utara kode H6.3
- 4) Balai Arkeologi Jawa Barat kode H6.4
- 5) Balai Arkeologi Maluku kode H6.5
- 6) Balai Arkeologi Sumatera Selatan kode H6.6
- 7) Balai Arkeologi Sulawesi Utara kode H6.7
- 8) Balai Arkeologi Kalimantan Selatan kode H6.8
- 9) Balai Arkeologi Sulawesi Selatan kode H6.9
- 10) Balai Arkeologi Papua kode H6.10

v. UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

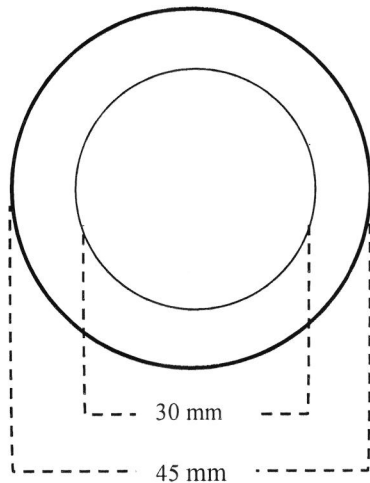
- |   |            |
|---|------------|
| 1) Balai Bahasa Aceh                        | kode I4.1  |
| 2) Balai Bahasa Sumatera Utara              | kode I4.2  |
| 3) Balai Bahasa Riau                        | kode I4.3  |
| 4) Balai Bahasa Sumatera Barat              | kode I4.4  |
| 5) Balai Bahasa Sumatera Selatan            | kode I4.5  |
| 6) Balai Bahasa D.I.Yogyakarta              | kode I4.6  |
| 7) Balai Bahasa Jawa Tengah                 | kode I4.7  |
| 8) Balai Bahasa Jawa Timur                  | kode I4.8  |
| 9) Balai Bahasa Jawa Barat                  | kode I4.9  |
| 10) Balai Bahasa Kalimantan Barat           | kode I4.10 |
| 11) Balai Bahasa Kalimantan Selatan         | kode I4.11 |
| 12) Balai Bahasa Kalimantan Tengah          | kode I4.12 |
| 13) Balai Bahasa Sulawesi Utara             | kode I4.13 |
| 14) Balai Bahasa Sulawesi Selatan           | kode I4.14 |
| 15) Balai Bahasa Sulawesi Tengah            | kode I4.15 |
| 16) Balai Bahasa Bali                       | kode I4.16 |
| 17) Balai Bahasa Papua                      | kode I4.17 |
| 18) Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat       | kode I4.18 |
| 19) Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara         | kode I4.19 |
| 20) Kantor Bahasa Jambi                     | kode I4.20 |
| 21) Kantor Bahasa Lampung                   | kode I4.21 |
| 22) Kantor Bahasa Kalimantan Timur          | kode I4.22 |
| 23) Kantor Bahasa Banten                    | kode I4.23 |
| 24) Kantor Bahasa Gorontalo                 | kode I4.24 |
| 25) Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung | kode I4.25 |
| 26) Kantor Bahasa Bengkulu                  | kode I4.26 |
| 27) Kantor Bahasa Kepulauan Riau            | kode I4.27 |
| 28) Kantor Bahasa Maluku Utara              | kode I4.28 |
| 29) Kantor Bahasa Maluku                    | kode I4.29 |
| 30) Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur       | kode I4.30 |

w. UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan | kode J6.1 |
| 2) Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan    | kode J6.2 |
| 3) Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan     | kode J6.3 |

C. Cap Dinas dan Cap Jabatan

1. Kerangka cap jabatan dan cap dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali cap jabatan dan cap dinas perguruan tinggi negeri.



2. Contoh cap jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia



3. Contoh cap dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipergunakan oleh Staf Ahli Mendikbud dan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



4. Contoh cap dinas unit utama



5. Contoh cap dinas pusat



6. Contoh cap dinas unit pelaksana teknis



7. Contoh cap jabatan perguruan tinggi negeri



8. Contoh cap dinas perguruan tinggi negeri



9. Contoh cap dinas fakultas



D. Kode Hal

1. Akreditasi	kode AK
2. Bantuan Pendidikan	kode BP
3. Evaluasi Pendidikan	kode EP
4. Hubungan Masyarakat	kode HM
5. Hukum	kode HK
6. Kebahasaan	kode BS
7. Kebudayaan	kode KB
8. Kemahasiswaan	kode KM
9. Kepegawaian	kode KP
10. Kerja Sama	kode KS
11. Kerumahtanggaan	kode RT
12. Ketatausahaan	kode TU
13. Keuangan	kode KU
14. Kurikulum	kode KR
15. Organisasi dan Tata Laksana	kode OT
16. Pendidikan Masyarakat	kode PM
17. Pendidikan dan Pelatihan	kode PP
18. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	kode PT
19. Penelitian dan Pengembangan	kode PG
20. Pengabdian kepada Masyarakat	kode AM
21. Pengawasan	kode WS
22. Penjaminan Mutu	kode PJ
23. Perbukuan	kode <u>PB</u>
24. Perencanaan dan Penganggaran	kode PR
25. Perlengkapan	kode LK
26. Perfilman	kode PF
27. Peserta Didik	kode PD
28. Publikasi Ilmiah	kode PI
29. Sarana dan Prasarana Pendidikan	kode SP
30. Teknologi Informasi dan Komunikasi	kode TI



E. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas

1. Unit Utama dan Pusat

No	Jenis Naskah Dinas	Menteri	Sesjen/Dirjen/Irjen/Ka. Badan	Staf Ahli	Karo/Ses unit utama/Direktur/Inspektur/Kapus	Kabag/Kasubdit/Kabid	Kasubbag/Kasi
1.	Peraturan*	√	√	-	-	-	-
2.	Keputusan	√	√	-	√	-	-
3.	Instruksi	√	√	-	-	-	-
4.	Prosedur Operasional Standar (POS)	√	√	-	√	-	-
5.	Surat Edaran	√	√	-	-	-	-
6.	Surat Dinas	√	√	√	√	√	√
7.	Nota Dinas	√	√	√	√	√	√
8.	Memo*	√	√	√	√	√	√
9.	Surat Undangan	√	√	√	√	-	-
10.	Surat Tugas	√	√	-	√	-	-
11.	Surat Pengantar	√	√	√	√	√	√
12.	Perjanjian Kerja Sama	√	√	-	-	-	-
13.	Surat Kuasa	√	√	√	√	√	√
14.	Surat Keterangan	√	√	√	√	√	√
15.	Surat Pernyataan	√	√	√	√	√	√
16.	Pengumuman	√	√	-	√	-	-
17.	Berita Acara	√	√	-	√	-	-
18.	Surat Perintah	√	√	-	√	-	-
19.	Nota Kesepahaman	√	√	-	√	-	-

2. Perguruan Tinggi Negeri

No	Jenis Naskah Dinas	Rektor/Ketua/Direktur	Purek/Warek/Puket/Wake/Pudir/Wadir	Dekan/Dir. PPS/sebutan lain yang sejenis	Pudek/Pudir PPS/sebutan lain yang sejenis	Kajur pada Univ, Inst, ST, Poli teknik	Ketua Lembaga sebutan lain yang sejenis	Kepala Pusat/ Ses Lembaga/sebutan lain yang sejenis pada Politeknik dan Sekolah Tinggi	Kepala UPT	Karo	Kabag	Kasubbag
1.	Peraturan*	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Keputusan	√	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-
3.	Instruksi	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Surat Edaran	√	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-
5.	Surat Dinas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.	Nota Dinas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7.	Memo*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8.	Surat Undangan	√	-	√	-	√	√	√	√	√	-	-
9.	Surat Tugas	√	-	√	-	-	√	√	√	√	-	-

No	Jenis Naskah Dinas	Rektor/ Ketua/ Direktur	Purek/ Warek/ Puket/ Wake/ Pudir/ Wadir	Dekan/ Dir. PPS/ sebutan lain yang sejenis	Pudek/ Pudir PPS/ sebutan lain yang sejenis	Kajur pada Univ, Inst, ST, Poli teknik	Ketua Lembaga sebutan lain yang sejenis	Kepala Pusat/ Ses Lembaga/ sebutan lain yang sejenis pada Politeknik dan Sekolah Tinggi	Kepala UPT	Karo	Kabag	Kasubbag
10	Surat Pengantar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	Perjanjian Kerja Sama	√	-	√	-	-	√	√	-	-	-	-
12	Surat Kuasa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
13	Surat Keterangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14	Surat Pernyataan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
15	Surat Pengumuman	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-
16	Berita Acara	√	√	√	-	-	√	-		√	-	-

### 3. Unit Pelaksana Teknis

No	Jenis Naskah Dinas	UPT Es II			UPT Es III		UPT Es IV
		Kepala UPT	Kabid/ Kabag	Kasubag /Kasubid /Kasi	Kepala UPT/ Ka.Set LSF	Kepala seksi/ Kasubbag	Kepala UPT
1.	Peraturan*	-	-	-	-	-	-
2.	Keputusan	√	-	-	√	-	√
3.	Instruksi	-	-	-	-	-	-
4.	Prosedur Operasional Standar (POS)	√	-	-	√	-	√
5.	Surat Edaran	-	-	-	-	-	-
6.	Surat Dinas	√	√	√	√	√	√
7.	Nota Dinas	√	√	√	√	√	√
8.	Memo*	√	√	√	√	√	√
9.	Surat Undangan	√	-	-	√	-	√
10.	Surat Tugas	√	-	-	√	-	√
11.	Surat Pengantar	√	√	√	√	√	√
12.	Perjanjian Kerja Sama	-	-	-	-	-	-
13.	Surat Kuasa	√	√	√	√	√	√
14.	Surat Keterangan	√	√	√	√	√	√
15.	Surat Pernyataan	√	√	√	√	√	√
16.	Pengumuman	√	-	-	√	-	√
17.	Berita Acara	√	-	-	√	-	√
18.	Surat Perintah	√	-	-	√	-	√

No	Jenis Naskah Dinas	UPT Es II			UPT Es III		UPT Es IV
		Kepala UPT	Kabid/ Kabag	Kasubag /Kasubid /Kasi	Kepala UPT/ Ka.Set LSF	Kepala seksi/ Kasubbag	Kepala UPT
19.	Nota Kesepahaman	-	-	-	-	-	-

\*: tidak dapat dilimpahkan

Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im  
NIP 196012041986011001

Tembusan:  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan